**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PUNGLI IURAN
SAMPAH DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
SEKTOR TAMPAN**

**Oleh: IRFAN SUTIKNO RAMADHAN
Program Kekhususan Hukum PIDANA
Pembimbing 1: Bapak Dr. Mukhlis. R, S.H., M.H.
Pembimbing 2: Elmayanti, S.H., M.H.
Alamat: Jl.karya IV, Perum Panomara Siak Hulu
Email: irfansutiknoramadhan@gmail.com**

ABSTRACT

Illegal levies are one of the crimes committed by every legal subject, both people and legal entities, directly or indirectly. Illegal levies are disgraceful acts committed to benefit oneself by abuse of power. Illegal levies are a form of crime that is very familiar to the public. Illegal levies are an act of violation of the law regulated in the Criminal Code (KUHP) Article 368 of the Criminal Code and Article 423 of the Criminal Code..

The objectives in writing this thesis are: First, to find out law enforcement against perpetrators of garbage collection in the jurisdiction of the Handsome Sector Police . Second, to find out the obstacles faced by law enforcers, especially the Handsome Sector Police against perpetrators of garbage collection. Third, to find out the efforts to overcome the obstacles faced by law enforcers, especially the Handsome Sector Police against perpetrators of garbage dues extortion. The type of legal research used by the author is a sociological legal research. This sociological research is a type of research in terms of legal objectives.

From the results of the study it was found that law enforcement against illegal levies was carried out by certain persons outside the Pekanbaru DLHK officers, namely arrests for 1 x 24 hours and coaching for the perpetrators of the illegal levies. the obstacle faced by law enforcers is that the perpetrators of the crime of extortion do not fulfill the elements in the crime of extortion, namely in the absence of elements of violence or threats of violence. The efforts of the Polsek to keep law enforcement in place, namely in the form of providing direction or outreach to the perpetrators and making a statement that they will not repeat the crime of extortion again. Author's Suggestion, First, Cooperation between the community and the police is further enhanced so that the police can uncover cases of illegal collection of garbage fees that often occur in the jurisdiction of the Tampan Police. Second, it is expected that the police apparatus will make stricter supervision, especially against perpetrators of criminal acts of illegal collection of waste fees. Third, it is hoped that the Handsome Police will add personnel so that they can maximize the strength of the assignment of members in the context of serving the community in order to create public order..

Keywords: Law Enforcement-Illegal Fees-Police Sector Pekanbaru

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pungutan liar atau biasa disingkat pungli dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum atau pelaku tertentu secara tidak sah atau melanggar aturan. Pungli merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pungli melibatkan dua pihak atau lebih, baik itu pengguna jasa ataupun oknum atau pelaku yang biasa melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan, dimana pada umumnya pungli yang terjadi pada tingkat lapangan dilakukan secara singkat dan biasanya berupa uang.¹

Penegakan hukum selama ini yang dilakukan Kepolisian Sektor Tampan apabila terkait pelaku yaitu hanya sebatas mengamankan, dan apabila terkait petugas yang melakukan pemungutan iuran sampah diluar dari kewenangannya maka Kepolisian Sektor Tampan melanjutkan kasus tersebut ketingkat penyidikan dan menetapkan status Tersangka kepada Pelaku atau Oknum tersebut dan melakukan pelimpahan berkas perkara kepada Kejaksaan, akan tetapi apabila kasus tersebut hanya sebatas pemungutan yang dilakukan oleh masyarakat/pelaku maka akan diselesaikan dengan musyawarah dan pengembalian uang pemungutan tersebut kepada korban tergantung kepada berapa nominal yang diimbulkan akibat kerugian pemungutan iuran sampah ilegal tersebut.²

¹Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M, dan Ainun Habibah, "Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol 12 No 2, Januari 2013, hlm.75.

²Wawancara dengan Bapak Kadarisman, Penyidik di Unit Reskrim, 22November 2021, bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Tampan.

Pungutan liar menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang sudah sangat akrab terdengar di telinga masyarakat. Pungutan liar merupakan sebuah tindak pelanggaran hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada Pasal 368 KUHP menyatakan, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Selain itu pada Pasal 423 KUHP menyatakan, pegawai negeri yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu melakukan sesuatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.³ Sepanjang tahun 2018 hingga 2021 ini, pungutan liar di Kepolisian Sektor Tampan makin sering terjadi, dikarenakan wilayah tampan atau yang disebut Binawidya pada saat ini masih rawan terhadap pungutan liar baik dari organisasi kemasyarakatan, masyarakat itu sendiri ataupun pelaku terkait dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel I.1
Jumlah Kasus Pungutan Liar
Yang Tercatat Di Polsek Tampan
Periode 2018-2021**

³Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

No.	Tahun	Jumlah Yang Diamankan Terkait Pungli	Jumlah Orang Yang Diamankan Terkait Pungli Iuran Sampah
1.	2018	37 orang	9 Kasus
2.	2019	41 orang	11 Kasus
3.	2020	25 orang	7 Kasus
4.	2021	17 orang	5 Kasus
Jumlah		120 orang	32 Kasus

Sumber : Polsek Tampan 2018-2021

Pertanyaan yang timbul selanjutnya bagaimanakah penegakan hukum mengenai pungutan liar iuran sampah di Kepolisian Sektor Tampan khususnya di wilayah hukum polsek tampan dan bagaimanakah kendala serta upaya yang dilakukan penegak hukum dalam memberantas pungutan liar iuran sampah di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tampan.

Untuk membahas itu semua penulis akan menuangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pungli Iuran Sampah Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tampan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelakupungli iuran sampah di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tampan?
2. Apasajakah kendala yang dihadapi penegak hukum khususnya Kepolisian Sektor Tampan terhadap pelaku pungli iuran sampah?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala yang dihadapi penegak hukum khususnya Kepolisian Sektor Tampan terhadap pelaku pungli iuran sampah?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku pungli iuran sampah di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tampan.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi penegak hukum khususnya Kepolisian Sektor Tampan terhadap pelaku pungli iuran sampah.
- c. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala yang dihadapi penegak hukum khususnya Kepolisian Sektor Tampan terhadap pelaku pungli iuran sampah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum Pidana khususnya terhadap kasus pungutan liar iuran sampah.
- b. Sebagai referensi bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dengan masalah yang sama sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran penulisan guna menjadi bahan kolektif perpustakaan Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi suatu kenyataan.⁴

Secara konsepsional inti dari penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup.⁵ Penegakan hukum yang baik merupakan kunci dari

⁴Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm. 15.

⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jaakarta, 2012, hlm. 5.

penegakan hukum yang baik.⁶ Dalam masyarakat mana pun, penegakan hukum akan memiliki peran penting dalam upaya masyarakat untuk mengurangi kejahatan.⁷

2. Teori Pidana

Dalam membahas masalah pidana dan pidana ada baiknya kita menjelaskan dulu apa arti pidana dan pidana tersebut. Menurut Van Hamel dalam Lamintang mengatakan bahwa arti dari pidana menurut hukum positif dewasa ini adalah: "Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara."⁸

E. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran, serta untuk pijakan bagi penulis dalam menentukan langkah-langkah penelitian, maka penulis memberikan batasan-batasan definisi antara lain:

1. Penegakan hukum adalah proses untuk mencapai atau mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, keinginan-keinginan hukum disini merupakan ide-ide dari badan pembuat undang-undang.⁹

⁶Erdianto Effendi, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1 Agustus 2010, hlm. 28.

⁷John N. Gallo, "Effective Law Enforcement Techniques For Reducing Crime", *Journal Of Criminal Law and Criminology*, Crim. L, & Criminology 1475, Summer 1998.

⁸PAF.Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 33.

⁹Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 135.

2. Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.¹⁰
3. Iuran adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada kelompok atau golongan pembayar. Contoh: iuran televisi, iuran keamanan, iuran sampah. Iuran tidak termasuk pajak.¹¹
4. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat di daur ulang menjadi barang yang bernilai.¹²
5. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yakni yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum itu berlaku di masyarakat. karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada

¹⁰ "Pungutan Liar (Pungli)" *Majalah Perwakilan BPKP*, Provinsi Sulawesi Selatan Edisi Triwulan III - Volume 26, 2016, hlm. 2.

¹¹ Sony Devano, Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Konsep Teori dan Isu*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2006, hlm. 21.

¹² Dinas Lingkungan Hidup, "Pengertian Dan Pengelolaan Sampah Organik Dan Anorganik", diakses melalui <https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-dan-pengelolaan-sampah-organik-dan-anorganik-13>, tanggal 2 Desember 2021.

¹³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Adimata, Bandung, 2011, hlm.98.

lokasi atau tempat yang diteliti untuk memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.¹⁴

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kepolisian Sektor Tampan

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.¹⁵ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Unit Reskrim Polsek Tampan
2. Penyidik di Unit Reskrim Polsek Tampan
3. Pelaku Pungutan Liar Iuran Sampah di Wilayah Hukum Polsek Tampan

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.¹⁶ Metode yang dipakai adalah Metode *Purposive* yang merupakan suatu cara pengambilan data terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti. Metode *purposive* adalah menetapkan jumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh sipeneliti. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi sampel dapat dilihat pada table berikut:

4. Sumber Data

¹⁴*Ibid.*, hlm. 51

¹⁵ Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 118.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 121

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.¹⁷

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari Undang-Undang, Peraturan Perundang-undangan, literatur-literatur atau melalui kepustakaan antara lain berasal dari :¹⁸

1) Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan penelitian yang diperoleh dari buku-buku, literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier yaitu bahan penelitian yang berasal dari website atau sejenisnya yang mendukung data primer dan data sekunder dan data sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.¹⁹
- b. Kajian kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengambil, mengkaji, menelaah,

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum Edisi 1 Cetakan ke-4*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.23.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, PT Renika Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 165

dan /menganalisis kutipan dari buku bacaan, literatur atau buku pendukung lainnya yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Teknik analisis data penulisan dilakukan dengan metode analisis data *kualitatif*. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengamatan, dan penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan.²⁰ Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode secara deduktif, yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.²¹

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah pidana atau perbuatan pidana.²²

2. Macam-Macam Delik

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam dua

jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:²³

- a. Kejahatan (*misdrijven*); dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*);

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.²⁴

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah:²⁵

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidakberbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarperson*).

B. Tinjauan Umum Mengenai Pungli

1. Pengertian Pungli

Dari segi bahasa, pungutan liar dibedakan menjadi dua kata, yaitu pungutan dan liar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer

²⁰Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 77

²¹Syarifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 40.

²²Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta: 2012, hlm. 20.

²³Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press: 2015, hlm.72.

²⁴Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media: 2015, hlm. 6.

²⁵Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia: 1983, hlm. 26-27.

dijelaskan bahwa pungutan artinya barang yang dipungut, dan liar artinya sembarangan, tidak sesuai aturan dan tidak diakui oleh penguasa.²⁶

2. Faktor Penyebab Pungutan Liar

Faktor penyebab pungli secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan pelaku pungli sebagai pemegang amanat berupa jabatan dan wewenang yang diembannya, antara lain:²⁷

- a. Ingin memperoleh kemawan hidup
- b. Kondisi sosial ekonomi
- c. Lemahnya iman dari pelaku pungli
- d. Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang
- e. Rendahnya pendapatan penyelenggara Negara
- f. Kemiskinan dan keserakahan
- g. Budaya memberi upeti
- h. Imbalan dan hadiah
- i. Apatis/tidak mau tahu
- j. Gagalnya pendidikan agama dan etika

3. Dampak Pungutan Liar Terhadap Masyarakat

Pungutan liar semakin marak di masyarakat dikarenakan proses pembiaran, baik secara sosial maupun politik. Secara politis, pungutan liar tumbuh subur karena perilaku pemerintah dan aparatnya. Bahkan apa yang dilakukan sekelompok orang dalam memungut retribusi liar adalah karena hal tersebut sah oleh perilaku aparat. Apalagi, para pemungut pungutan liar rata-rata mengenakan pakaian seakan-akan pakaian resmi.

Sebab, gejala pungutan liar sebenarnya adalah proses duplikasi masyarakat atas perilaku elit.²⁸

Artinya, sekelompok orang meniru praktik yang dilakukan oleh elit pemerintah. Ini merupakan tindakan yang masih masuk akal. Pasalnya, banyak pungutan yang mengatasnamakan Pemerintah tetapi pertanggung jawabannya tidak jelas. Dalam dimensisosial, gejala pungutan liar ini sepertinya sudah menjadi aturan sosial yang terformalisasi. Pemahaman tentang praktik pemerasan, pengemis, dan premanisme bercampur aduk. Orang semakin sulit membedakan manayang retribusi, pemerasan, mengemis, dan preman. Dengan kondisi ini, pungutan liar menjadi semacam kejahatan terorganisir yang muncul dalam bentuk pengemis, preman. Jadi, melihat fenomena ini, harus adapenegakan hukum yang tegas, terutama terhadap tindakan pungutan liar.²⁹

4. Pungutan Liar Dalam Peraturan Perundang-undangan

Larangan melakukan perbuatan pungutan liar tidak diatur secara terperinci, melainkan pungutan liar termasuk dalam kategori pemerasan yang diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:³⁰

“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk

²⁶Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Modern English Press. Jakarta:1991, hal. 1206.

²⁷Syamsir Alam, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar, *Skripsi* Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2017, hlm. 44.

²⁸ Putri Indriani, Zuleha, Siti Sahara, Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Yang Dilakukan Preman, *Meukuta Alam* Volume 2, Nomor 1, Juni 2020, hlm. 83.

²⁹*Ibid.*

³⁰ Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana paling lama sembilan tahun.”

C. Tinjauan Umum Mengenai Pidanaan

Dalam membahas masalah pidana dan pidanaan ada baiknya kita menjelaskan dulu apa arti pidana dan pidanaan tersebut. Menurut Van Hamel dalam Lamintang mengatakan bahwa arti dari pidana menurut hukum positif dewasa ini adalah: “Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.”³¹

Dari rumusan mengenai pidana di atas dapat diketahui bahwa pidana sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti pidana bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Hal tersebut perlu dijelaskan, agar di Indonesia jangan sampai terbawa oleh arus kacaunya cara berfikir dari para penulis di Negeri Belanda, karena mereka seringkali telah menyebut tujuan dari pidanaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis tanpa menyadari kacaunya cara berfikir penulis Belanda itu, secara harfiah telah menerjemahkan perkataan *doel der straf* dengan perkataan tujuan dari

pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan *Doel der straf* sebenarnya adalah tujuan dari pidanaan.

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa: Pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana. Menurut Vos, bahwa teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.³²

BAB III

Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

A. Gambaran Umum Tentang Kota Pekanbaru

1. Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku yang disebut Batin. Daerah yang mulanya hanya ladang, lambat laun menjadi sebuah perkampungan. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.³³

³¹PAF.Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 33.

³²Zainal Abidin Farid, *Op.Cit*, hlm. 11.

³³<http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru/>, diakses, tanggal, 9Nopember 2022.

2. Visi Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru 2025 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011, yaitu: "terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan melayu, menuju masyarakat sejahtera berlandaskan iman dan taqwa."

3. Letak Geografis

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14'-101°34' Bujur Timur dan 0°25'-0°45' Lintang Utara. Ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter.³⁴

BAB IV

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pungli Iuran Sampah Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tampan.

Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh karena itu tidak heran apabila orang mengatakan bahwa hukum tidak bisa lagi disebut hukum, jika ia tidak terlaksanakan. Saat ini, perkembangan yang terjadi dalam masyarakat sangat cepat sebagai akibat dari pembangunan pada segala bentuk kehidupan termasuk dalam hukum, terkadang membawa dampak yang tidak selamanya positif terhadap perkembangan pembangunan tersebut.³⁵

Hal ini bisa dilihat dengan meningkatnya angka kejahatan dalam masyarakat yang terjadi dalam masyarakat dari waktu ke waktu, hal ini terjadi karena tidak diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan

yang tersedia.³⁶ Disamping itu, kurangnya efektifitas pelaksanaan hukum yang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat, pada dasarnya disebabkan oleh banyak faktor. Dari banyaknya faktor tersebut dapat digolongkan dalam dua faktor, yaitu faktor dari sisi aparat penegak hukumnya dan faktor dari sisi peranan masyarakat dalam penegakan hukum.³⁷

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru telah mengeluarkan Keputusan Wali kota tentang peralihan pungutan retribusi sampah. Pungutan yang sebelumnya menjadi tugas Lembaga Keswadayaan Masyarakat Rukun Warga (LKM-RW) kini dialihkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Kepala DLHK Kota Pekanbaru Agus Pramono mengatakan, peralihan itu sesuai Surat Keputusan (SK) Wali kota Nomor 52 Tahun 2020 tertanggal 9 Januari 2020. Masyarakat dilarang membayar retribusi kepada oknum tertentu selain petugas DLHK. "*Kalau saya sebut tadi oknum-oknum tertentu itu, LKMRW kah, pemuda tempatan kah, atau orang-orang yang mengambil itu, entah siapa pun orangnya, saya tidak menuduh, itu namanya sudah Pungli. Pungli itu ada pidanannya,*" tegasnya, Jumat (14/8/2020).³⁸ Berdasarkan pernyataan tersebut jelas bahwa selain dari petugas DLHK Kota Pekanbaru yang memungut iuran retribusi sampah adalah Pungli (Pungutan Liar).

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pungutan liar tidak diatur secara terperinci, namun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pengaturan mengenai tindak pidana pemerasan yang mempunyai unsur yang sama dengan

³⁴ Katalog Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru, 2016, hlm. 1.

³⁵ Leursanus Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2015, hlm. 1.

³⁶ *Ibid.* hlm. 2.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ <https://www.idnjurnal.com/news/detail/8490/ada-pungli-retribusi-sampah-laporkan-ke-08526363653>, diakses pada tanggal 9 Nopember 2022.

tindak pidana pungutan liar, Pasal 368.
:³⁹

Penegakan hukum yang seharusnya dilakukan menurut aturan yang berlaku, para oknum atau pelaku tindak pidana pungutan liar tersebut dapat dijerat hukuman pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun sesuai dengan aturan dalam pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Berdasarkan hasil Wawancara dengan *Bapak Kadarisman*, Penyidik di Unit Reskrim Kepolisian Sektor Tampan, bahwa tindak pidana pungutan liar ini adalah delik

aduan, dimana maksud dalam delik aduan itu ialah suatu tindak pidana tidak dapat diproses apabila tidak ada pengaduan dari orang yang merasa dirinya telah dirugikan. Jika pihak kepolisian tidak menerima aduan dari masyarakat maka pihak kepolisian tidak bisa melanjutkan perkara tersebut. Beliau juga menegaskan bahwa dalam kasus yang sering terjadi masyarakat selalu melaporkan kepada pihak kepolisian sektor tampan dan laporan langsung diproses.⁴⁰

Penegakan hukum selama ini yang dilakukan Kepolisian Sektor Tampan apabila terkait pelaku yaitu hanya sebatas mengamankan, dan apabila terkait petugas yang melakukan pemungutan iuran sampah diluar dari kewenangannya maka Kepolisian Sektor Tampan melanjutkan kasus tersebut ke tingkat penyidikan dan menetapkan status Tersangka kepada Pelaku atau Oknum tersebut dan melakukan pelimpahan berkas perkara kepada Kejaksaan, akan tetapi apabila kasus tersebut hanya sebatas pemungutan yang dilakukan oleh masyarakat/pelaku maka akan diselesaikan dengan musyawarah dan pengembalian uang pemungutan

tersebut kepada korban tergantung kepada berapa nominal yang diimbulkan akibat kerugian pemungutan iuran sampah ilegal tersebut.⁴¹

Penegakan hukum yang seharusnya dilakukan menurut aturan yang berlaku, para pelaku pungli atau pelaku tindak pidana pungutan liar tersebut dapat dijerat hukuman pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun sesuai dengan aturan dalam pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sementara itu, pada kenyataannya penegakan hukum yang dilakukan pihak reskrim Polsek Tampan terhadap pelaku pungutan liar di Wilayah Hukum Polsek Tampan sebagai berikut :

1. Melakukan Penangkapan 1x24jam
2. Melakukan Pembinaan

B. Kendala Yang Dihadapi Penegak Hukum Khususnya Kepolisian Sektor Tampan Terhadap Pelaku Pungli Iuran Sampah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut;⁴²

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang

³⁹Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴⁰ Wawancara dengan *Bapak Kadarisman*, Penyidik di Unit Reskrim, 8 November 2022, bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Tampan

⁴¹Wawancara dengan *Bapak Kadarisman*, Penyidik di Unit Reskrim, 8November 2022, bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Tampan.

⁴²*Ibid* ,hlm 10

didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Menurut *Bapak Aspikar*, terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan tidak terjalankannya proses tindakan yang sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah sebagai berikut:⁴³

1. Faktor Hukumnya sendiri
2. Faktor Aparat Penegak Hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor budaya

C. Upaya Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Penegak Hukum Khususnya Kepolisian Sektor Tampan Terhadap Pelaku Pungli Iuran Sampah.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁴⁴

Penegasan dalam konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia tersebut, dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 13 yang menentukan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain:⁴⁵

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai penegak hukum

khususnya dalam proses pidana, kepolisian memiliki kewenangan sebagai penyidik dan penyidik. Kewenangan ini dipertegas dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁴⁶KUHAP membedakan antara penyidik dan penyidik. Penyidik melakukan penyelidikan dan penyidik melakukan penyidikan. Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan adalah tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Adapun penyidikan menurut pasal 1 angka 2 KUHAP merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁴⁷

Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban pihak kepolisian khususnya Polsek Tampan melakukan usaha untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku pungli iuran sampah di wilayah hukum Polsek Tampan, dengan menempuh beberapa cara yaitu:⁴⁸

⁴³ Wawancara dengan *Bapak Aspikar*, Kanit Reskrim Polsek Tampan Pekanbaru 8 November 2022, bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Tampan.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴⁵ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

⁴⁶ pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁴⁸ Wawancara dengan *Bapak Aspikar*, Kanit Reskrim Polsek Tampan Pekanbaru 8 November 2022, bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Tampan.

- 1) Melakukan pembinaan internal mengenai kode etik dan disiplin Kepolisian.
- 2) Himbauan kepada anggota Kepolisian mengenai sanksi hukum apabila melakukan kejahatan.
- 3) Arahan dari pimpinan berupa nasehat dan instruksi terhadap anggota Kepolisian untuk melakukan kewajiban sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- 4) Mengirim penyidik bagian intel untuk mengetahui bagaimana pelaku melakukan praktik pungutan liar khususnya terhadap pelaku pungutan liar iuran sampah di wilayah hukum Polsek Tampan.
- 5) Pencegahan dan penanggulangan yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial yang berlaku serta berperang aktif menciptakan, memelihara, atau meningkatkan ketertiban dan keamanan bagi diri dan lingkungan.
- 6) Upaya penangkapan dan proses pengajuan kepengadilan penindakan atau penghukuman terhadap para pelaku pungutan liar berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara penulis *Bapak Aspikar*, Kanit Reskrim Polsek Tampan Pekanbaru mengatakan bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan kerjasama dengan pihak terkait yaitu dengan pihak DLHK Kota Pekanbaru bersama dengan masyarakat di kecamatan tampan untuk meberikan edukasi kepada masyarakat dalam hal ini masyarakat kecamatan tampan

supaya memahami dan mematuhi aturan yang berlaku. Pihak Kepolisian juga menganjurkan kepada setiap orang yang ada di kecamatan tampan supaya tidak memberikan iuran kebersihan kepada orang yang bukan dari pihak DLHK kota pekanbaru.⁴⁹ Kemudian memberikan sanksi tegas kepada siapapun yang melakukan pungutan liar (pungli) terhadap pembayaran retribusi sampah di masyarakat dengan mengambil langkah hukum. Pihak DLHK berkoordinasi dengan tim Saber Pungli dari Polresta Pekanbaru beserta kepala dusun untuk menangkap oknum yang dapat mengganggu dan merugikan masyarakat soal kebersihan.

Dengan rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan teori pemidanaan bahwa dalam upaya untuk mengatasi hambatan dari pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pungli iuran sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru beberapa diantaranya adalah dengan membentuk tim Satgas khusus dari tim kepolisian Polsek Tampan bersama pihak DLHK Kota Pekanbaru mengenai Pelaku Pungli Iuran sampah kemudian dari pihak kepolisian juga akan melakukan kerjasama dengan DLHK Kota Pekanbaru untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi mengenai tindakan-tindakan pungli iuran sampah kemudian akan melakukan penindakan terhadap pelaku pungli iuran sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh oknum tertentu diluar petugas DLHK Pekanbaru yaitu dilakukan

⁴⁹Wawancara dengan *Bapak Aspikar*, Kanit Reskrim Polsek Tampan Pekanbaru 8 November 2022, bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Tampan.

penangkapan selama 1x24jam dan dilakukan pembinaan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana pungutan liar tersebut.

2. Kendala yang dihadapi penegak hukum adalah Pelaku tindak pidana pungutan liar tidak memenuhi unsur dalam tindak pidana pemerasan, yakni berupa tidak adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Untuk upaya dari pihak Polsek agar penegakan hukum tetap ada yakni berupa memberikan pengarahan atau sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih bijak memberikan iuran kebersihan dan juga kepada pelaku untuk membuat surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi tindak pidana pungutan liar lagi.
3. Upaya Kepolisian dalam mengatasi kendala yang dihadapi penegak hukum khususnya kepolisian sektor tampan terhadap pelaku pungli iuran sampah adalah dengan melakukan penyelidikan yang dilakukan oleh tim intel untuk mencari informasi mengenai pelaku tindak pidana pungli iuran sampah serta memberikan sosialisasi serta pembinaan internal terhadap aparat kepolisian khususnya Polsek Tampan kemudian dengan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak memberikan iuran sampah selain dari petugas dari DLHK Kota Pekanbaru.

B. Saran

1. Kerja sama antara masyarakat dengan pihak kepolisian lebih ditingkatkan agar pihak kepolisian dapat mengungkap kasus pungutan liar iuran sampah yang sering terjadi di wilayah hukum Polsek Tampan.
2. Diharapkan kepada pihak aparat kepolisian untuk membuat pengawasan lebih ketat khususnya terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar iuran sampah.
3. Diharapkan kepada Polsek Tampan untuk melakukan penambahan

personil agar dapat memaksimalkan kekuatan penugasan anggota dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat guna menciptakan ketertiban umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, R., 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Ashofa, Burhan 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andrisman, Tri. 2007. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Chazawi, Adami, 2009, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ediwarman, 2018, *Monograf Sejarah Hukum*, Medan.
- Effendi, Erdianto 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Adimata, Bandung.
- Irfan, H.M. Nurul. 2011. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljiatno. 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hatta, Moh. 2010, *Kebijakan Politik Kriminal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Ilyas, Amir 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rengrang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- M. Sholehuddin, 2004. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015. *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nursariani dan Faisal, 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*, CV. AnugerahAditya Persada, Medan.
- PAF.Lamintang, 2010. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rahma, Ronny Nitibaskara, 2006, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soemarwoto, Otto, 2001. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta,
- Utsman, Sabian, 2008, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Wibowo, Eddi, dkk, 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta.
- Wijayanto dan Ridwan Zachrie, 2009. *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi/Majalah

- Adisti Fauziah, 2018, Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Saber Pungli Di Wilayah Hukum Polres Kota Yogyakarta, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunankalijaga Yogyakarta.
- Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, 1998-1999, Home Liability Coverage: Does the Criminal Acts Exclusion Work Where the Expected or Intnded Exclusion Failed? *Connecticut Insurance Law Journal* 5, Corn Ind.LJ. 707.
- Dila Qoriah, 2020, Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar Angkutan Batu Bara Di Desa Rantau Puri Kabupaten Batanghari, *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Erdiansyah, 2010, Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Riau, Vol. 1 No. 1, Agustus.
- Laura Nader & Harry F. Todd Jr, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, New York: Columbia University Press, 1978, hlm. 9-11, *Westlaw*.
- Putri Indriani, Zuleha, Siti Sahara, 2020. Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Yang Dilakukan Preman, *Meukuta Alam* Volume 2, Nomor 1, Juni
- Pungutan Liar (Pungli), 2016, *Majalah Perwakilan BPKP*, Provinsi

- Sulawesi Selatan Edisi Triwulan III - Volume 26.
- Samuel James Jhonson, 2015, Supreme Court of the united state: judgment and sentence, *Journal Constitutional Law*, Cahpter 5, Issues 1.
- Syamsir Alam, 2017. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar, *Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar*.
- Wahyu Ramadhani, 2017. Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik, *jurnal hukum Samudra Keadilan*, Volume, 12, Nomor. 2, Juli-Desember,

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202.

D. Website

- <https://kbbi.web.id/oknum>, diakses, tanggal 2 Desember 2021
- <https://dlh.bulelengkab.go.id/informas-i/detail/artikel/pengertian-dan-pengelolaan-sampah-organik->

- <http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru/>, diakses, tanggal, 9 Nopember 2022.